PROSES FORMULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) DESA SUNGAI RENGIT TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-I Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

Mini Ekasari
07011281419204

Kosentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Mei 2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Proses Formulasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Sungai Rengit Tahun 2017"* telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 15 Mei 2018.

Indralaya, Mei 2018

Ketua:

1. Drs. Gatot Budiarto, Ms
NIP. 195806091984031002

Anggota:

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

2. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 197705122003121003

3. Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Mengetahui:

Dekan FISIP	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si	Zailani Surya Marapaung, S.Sos., MPA
NIP. 196311061990031001	NIP. 19810827 200912 1 002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan".

(CHRISTOPHER COLOMBUS)

Dengan rahmat Allah Subhanahuwata'ala, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku tercinta bapak Saripi dan ibu Sumini**
- **Kedua saudaraku Indah dan Ayu**
- **Sahabat suka dan duka Ajeng, Anita, Minik, Rini dan Zela**
- **Kawan seperjuangan FISIP angkatan 2014**
- **Almamater kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"**Proses Formulasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Sungai Rengit Tahun 2017" tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kurikulum pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru kepada para pembaca.

Selama masa penulisan, penulis menyadari banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga Usulan Penelitian ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orangtuaku Bapak (Saripi) dan Ibu (Sumini) yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materiil serta pengorbanan yang tiada batas.
2. Saudaraku Indah, Ayu dan sanak keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dra Martina, M.Si selaku selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Suhaimi selaku Kepala Desa Sungai Rengit periode 2016-2021.
9. Bapak Muhammad Darmawi selaku Sekretaris Desa Sungai Rengit periode 2016-2021.
10. Seseorang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabatku Ajeng Tri Surya, Anita Ramadhani, Rini, Siti Yamini, dan Zela Nesti Dewi yang selalu memberikan saran dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga Usulan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, Mei 2018

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Proses Formulasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Sungai Rengit Tahun 2017". Latar belakang penelitian ini yaitu adanya ketidak tepatan watu dalam penyusunan RKPDes dan kurangnya sumber daya manusia dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses formulasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit Tahun 2017. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori David Easton yang terdiri dari dimensi *input*, proses, *output* dan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *data reduction, data display*, dan *conclusion drawing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi rencana kerja pemerintah desa sungai rengit tahun 2017 dapat dikatakan cukup baik meskipun ditemukan masalah berupa kurangnya sumber daya manusia dan keterlambatan pembentukan tim penyususun RKPDes. Menyikapi persoalan yang ada pemerintah desa sungai rengit harus lebih memperhatkan Permendagri no 114 tahun 2014 sebagai pedoman dalam penyusunan RKPDes dan perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pemahaman para tim penyusun mengenai proses penyusunan RKPDes. Dalam proses formulasi RKPDes ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan *intrasociental* dan *extrasocietal*.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan, Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Gatot Budiarto, MS	Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 195806091984031002	NIP. 196211251989121001

Indralaya, Mei 2018

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA.

NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is entitled as "Formulation Process of Rural Government Work Plans (RKPDes) Desa Sungai Rengit Year 2017". The background is an inaccurate of time about preparation of Rural Government Work Plans and the lack of human resources in the process of preparing the Rural Government Work Plans (RKPDes). The purpose of this research is to aknowledge how the formulation process of Government Work Plans at Desa Sungai Rengit in 2017. This study is using David Easton theory which consists of dimensions on input, process, output and environment. This study happens with qualitative method by using data collection technique in depth interview, participant observation and documentation. Data analysis techniques used such as data reduction, display data, and conclusion drawing. The result of the research shows that the formulation process of government work plans in Desa Sungai Rengit in 2017 might be quite good despite of the problems as a lack of human resources and the delay of forming RKPDes compilation team. Responding to existing issues, the local government should be more concerned about Permendagri Number 114 Year 2014 as a guidance in the framing of RKPDes and the necessity of training education to improve the comprehension amongst compiler teams towards the process of preparing RKPDes. This process of formulation RKPDes is also strongly influenced by intrasociental and extrasocietal environmental factors.

Keywords: Public Policy, Policy Formulation, Rural Government Work Plans.

Advisor I

Drs. Gatot Budiarto, MS

NIP. 195806091984031002

Advisor II

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Indralaya, Mei 2018

Chairman of the Departement of Public Adminstration

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya Universuty

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA

NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

LAMPIRAN ..... **xi**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
   1. Manfaat Teoritis 9
   2. Manfaat Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 10
   1. Kebijakan Publik 10
   2. Formulasi Kebijakan 12
   3. Model Formulasi Kebijakan 14
      a. Model Sistem 14
      b. Model Rasional 18
      c. Model Penambahan (Inkremental) 19
      d. Model Strategis 20
      e. Model Elit 20
   4. Rencana Kerja Pemerintah Desa 21
      a. Rencana Kerja Pemerintah Desa 21
      b. Rujukan Pnyusunan RKP-Des 22
      c. Pelaksanaan Penyusunan RKP-Des 22
B. Model Formulasi Yang Di Pakai 31
C. Penelitian Terdahulu 32
D. Kerangka Pemikiran 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 35
B. Definisi Konsep 35
C. Fokus Penelitian 36
D. Jenis Dan Sumber Data 37
E. Informan Penelitian 38
F. Teknik Pengumpulan Data 30
G. Teknik Pemeriksaan Data 40
H. Teknik Analisis Data 40

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Rengit 42
B. Peta Dan Kondisi Geografis 43
1. Letak Geografis Desa Sungai Rengit 43
2. Demografi Desa Sungai Rengit 45
3. Pendidikan 47
4. Perekonomian Desa 48
5. Kesehatan 49
6. Keagamaan 50
7. Kesejahteraan Masyarakat 51
8. Prasarana Dan Sarana Desa 51
9. Kelembagaan Desa 53
10. Organisasi Kemasyarakatan 54
11. Struktur Organisasi 56
12. visi dan misi desa 57

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dimensi Input 61
1. Ketersediaan Data 62
2. Kelengkapan Informasi 74
3. Kecukupan Sumber Daya Manusia 80
4. Kelengkapan Sarana Dan Prasarana 84
B. Dimensi Proses 86
1. Penyusunan Rancangan RKPDes Desa Sungai Rengit 86
2. Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa 90
3. Penetapan RKPDes Desa Sungai Rengit 96
C. Output 99
D. Lingkungan 101
1. Pengaruh Lingkungan *Intrasociental* 101
2. Pengaruh Lingkungan *Extrasocietal* 104

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 109
B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA 11

DAFTAR TABEL

Tabel ..... Halaman

1. Rincian Pembagian Dana Desa Kecamatan Talang Kelapa 2017 5
2. Daftar Jumlah Pejabat Administrasi Desa Sungai Rengit 8
3. Penelitian Terdahulu.....31
4. Fokus Penelitian 34
5. Krio dusun/Kepala Desa/Kades desa Sungai Rengit.....43
6. Jumlah Penduduk Desa Sungai Rengit Tahun 2017.....45
7. Jumlah Penduduk Desa Sungai Rengit Tahun 2016/2017.....45
8. Jumlah Penduduk berdasarkan usia Tahun 2016/2017.....46
9. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2016/2017 48
10. Jumlah Sarana Pendidikan.....48
11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016/2017 49
12. Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di Desa Sungai Rengit ..49
13. Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sungai Rengit Tahun 2017 50
14. Jumlah Sarana Ibadah di Desa Sungai Rengit Tahun 2017.....50
15. Kesejahteraan Sosial di Desa Sungai Rengit tahun 2017.....51
16. Daftar Pembangunan yang bersumber dari APBD, APBN 2017 51
17. Daftar Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah Desa 52
18. Nama-Nama Kepala Dusun se Desa Sungai Rengit.....52
19. Nama Ketua RT Desa Sungai Rengi 53
20. Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sungai Rengit 54
21. Daftar Nama Anggota LPM Desa Sungai Rengit.....55
22. Ketersediaan Data.....62
23. Jumlah Penduduk Desa Sungai Rengit Tahun 2017.....65
24. Jumlah Penduduk berdasarkan usia Tahun 2016.....66
25. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016. ...68
26. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016.....69
27. Jumlah Sarana Pendidikan.....71
28. Jumlah Sarana Prasarana Di Bidang Kesehatan Tahun 2016.....71
29. Jumlah Sarana Ibadah Tahun 2016.....71
30. PMKS Di Desa Sungai Rengit Tahun 2016 72
31. Asumsi Gambaran Umum Pendapatan Desa Tahun 2017.....73
32. Uraian Perkiraan Biaya Belanja Desa Untuk Tahun 2017 74
33. Kelengkapan Informasi.....75
34. Bidang Dan Jenis Kegiatan Pemerintah Desa tahun ke-2 77
35. Hasil Penyesuaian Dan Penyelarasan Program Dan Kegiatan Desa 79
36. Sumber Daya Manusia yang Terlibat Dalam Formulasi RKPDes ...80
37. Sarana Formulasi RKPDes desa Sungai Rengit Tahun 2017.....85
38. Prasarana Formulasi RKPDes desa Sungai Rengit Tahun 2017 85
39. Isi Jenis Kegiatan Yang Akan Di Rencanakan RKPDes 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar ..... Halaman

1. Kerangka Kerja Yang Dikembangkan Oleh David Easton 16
2. Model Sistem Diadopsi Dari David Easton.....30
3. Kerangka Pemikiran 32
4. Diagram Persentase Luas Wilayah Desa Sungai Rengit (Ha).....44
5. Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk 45
6. Pertumbuhan Penduduk Desa Sungai Rengit Tahun 2017.....46
7. Bagan Struktur Organisasi Kepemerintahan Desa 56
8. Bagan Struktur Organisasi Kepemerintahan Desa 57
9. Diagram Persentase Luas Wilayah Desa Sungai Rengit (Ha).....64
10. Presentase Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan 2016 66
11. Grafik Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Usia Tahun 2017.....67
12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016....70
13. Surat Keputusan pembentukan tim penyusun RKPDes 83
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2017 91
15. Penyampaian Program dan Kegiatan Desa Untuk Tahun 2017 93
16. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2017.....97
17. Matriks Hasil Temuan Proses Formulasi RKPDesTahun 2017 105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran ..... Halaman

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.....120
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Rengit Periode 2016-2021.....154
3. Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Sungai Rengit Tahun 2016 159
4. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit Tahun 2017 162
5. Daftar Hadir Musyawarah Penyusunan/Penetapan RKPDes Tahun 2017 165
6. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sungai Rengit Tentan Kesepakatan Penetapan RKPDes 2017 167
7. Pedoman Wawancara 168
8. Pedoman Dokumentasi 172
9. Pedoman Observasi 173
10. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi.....174
11. Lembar Revisi Seminar Usulan Sripsi 176
12. Kartu Bimbingan Skripsi 181
13. Surat Tugas Penunjukan Pembimbing Usulan Skripsi 185
14. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Skripsi 186
15. Surat Penelitian.....187
16. Surat Balasan Dari Pemerintah Desa Sungai Rengit 188

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KK	: Kepala Keluarga
RKD	: Rekening Kas Desa
RKP-Des	: Rencana Kerja Pemernitah Desa
RPJM-Des	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki kesatuan masyarakat terendah langsung dibawah camat, dan berhak menyelanggarkan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah administratif desa sering digambarkan dengan wilayah yang masih sangat tradisional yang jauh dari hiruk pikuk suasana perkotaan dengan suasana politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa didalamnya disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Lahirya undang-undang tersebut merupakan sebuah mandat yang diberikan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan daftar rincian dana desa tahun 2016 keseluruhan dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp. 60 Triliun yang akan di alokasikan kepada 74.954 desa dan akan disalurkan dalam 2 tahap periode. Tahap I dilakukan pada bulan April 2017 dan tahap II pada bulan September 2017. (http://kedesa.id)

Penyaluran dua tahap tersebut dilakukan sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Untuk bisa mencairkan dana desa mendapatkan penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) pemerintah desa harus menyerahkan dokumen-dokumen, sebagai berikut:

1. Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun anggaran berjalan.

   Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang di biayai dengan uang desa . Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa melalui proses musyawarah desa yang dilakukan oleh aktor-aktor desa yang terkait. RJPM Desa adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk sekali masa kekuasaan. RPJM Desa merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah untuk masa 6 Tahun jabatan Kepala Desa, RPJMDes setidaknya berisi tentang visi misi kepala desa dan apa yang akan di kerjakan kedepan selama masa jabatannya. Di dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan yang bakal di lakukan pemerintah desa. Sedangkan untuk mendapatkan pencairan dana desa maka

pemerintah desa harus lebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam masa 1 (satu) tahun. RKP-Des ini harus sesuai dengan yang ada dalam penjelasan RPJMDes . RKP desa disusun mulai bulan juli dan maksimal di tetapkan pada september tahun berjalan.

2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya yaitu laporan mengenai rincian banyaknya anggaran dana desa yang telah di gunakan pada tahun sebelumnya sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya laporan penggunaan anggaran ini dapat diketahui besarnya anggaran yang di gunakan dan dipergunakan untuk apa saja.

Pemerintah Mengacu pada persyaratan pertama yaitu menyerahkan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun berjalan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Paragraf 1 pasal 29 disebutkan bahwa Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah disebut pula sebagai proses formulasi kebijakan publik. Formulasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan publik karena merupakan tahap yang paling penting sebelum di lakukannya implementasi dan evaluasi dalam sebuah kebijakan. Dalam formulasi kebijakan terdapat dua kegiatan perumusan kebjakan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih dan hasilnya berupa kesepakatan yang disetujui. Kegiatan yang kedua yaitu suatu keputusan kebijakan yang mencakup tindakan yang dilakukan seorang pejabat maupun lembaga untuk menyetujui, mengubah bahkan menolak alternatif kebijakan yang telah dipilih. Dalam proses formulasi kebijakan tentu saja terdiri dari beberapa tahap yaitu *input*, proses dan *output* yang di pengaruhi oleh linkungan baik itu lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Proses formulasi Kebijakan Rencana Kerja pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus disusun sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pmerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pagu indikatif merupakan perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan RKP-Des.

Dalam musyawarah proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa kepala desa harus mengikutsertakan masyarakat desa hal ini tertulis jelas di dalam pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. Semua kegiatan penyususan dilakukan dalam suasana musyawarah desa. Adapun unsur-unsur dari

masyarakat desa ini, antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengerajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi budaya masyarakat desa, selain itu juga unsur masyarakat dapat disesuaikan dengan kondisi budaya sosial desa. Rencana kerja pemerintah desa di tetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Berdasarkan rincian pembagian dan penetapan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dalam Kabupaten Banyuasin dapat dilihat besarnya pembagian dan penetapan dana desa di Kecamatan talang kelapa tahun 2017. Desa Sungai Rengit adalah desa yang menerima dana desa terbesar ketiga dari enam desa di kecamatan Talang Kelapa pada tahun 2017 dengan jumlah pagu dana desa sebesar RP. 834.597.893. Sedangkan desa yang menerima dana desa terbesar pertama dan terkecil adalah desa Kenten Laut dan desa Talang Buluh.

Tabel 1.1 Rincian Pembagian dan Penetapan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN Untuk Desa Dalam Kecamatan Talang Kelapa Tahun 2017

Kecamatan	Nomor Rekening Kas Desa	Desa	Pagu Dana Desa
Talang Kelapa	167.09.05607	Sungai Rengit	834.597.893
	167.09.12502	Pangkalan Benteng	782.110.325
	167.09.13036	Gasing	839.751.110
	167.09.12521	Talang Buluh	774.416.300
	167.09.09097	Sungai Rengit Murni	802.421.297
	167.09.08281	Kenten Laut	899.147.927

Sumber : Peraturan Bupat Banyuasin No 08 Tahun 2017

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Desa Sungai Rengit, hal ini berdasarkan dari data rincian pembagian dana desa di kecamatan Talang Kelapa Tahun 2017 yang memperlihatkan bahwa desa Sungai Rengit merupakan salah satu desa yang menerima dana desa terbesar ketiga setelah desa Kenten Laut dan desa Gasing. Selain itu pula pemilihan fokus penelitian di Desa Sungai Rengit ini dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kemudahan akses untuk menjangkau Desa Sungai Rengit sebagai tempat penelitian serta

kemudahan memperoleh data hal inilah yang menjadi alasan pemilihan desa Sungai Rengit sebagai fokus penelitian ini.

Untuk pencairan dana desa setiap pemerintah desa di wajibkan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai salah satu syarat administratif desa untuk mendapatkan dana desa. Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) ini tentu saja di lakukan oleh pemerintah desa Sungai Rengit. Namun pada kenyataannya apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak semuanya dapat berjalan dengan mulus, berdasarkan data observasi awal yang didapat oleh peneliti di lapangan dalam proses formulasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit di temukan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. **Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit Tahun 2017 Dibuat Hanya Berdasarkan Kebutuhan Dan Berpedoman Dari Pengalaman Tahun Lalu.**

Berbicara mengenai pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun2017 yang dilakukan desa Sungai Rengit berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada sekretaris desa Sungai Rengit pada tanggal 16 Oktober 2017 beliau mengatakan bahwa:

> “ Kami hanya menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sesuai dengan kebutuhan bagi desa kami, pada dasarnya kami membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sesuai dengan petunjuk teknis tapi sulit untuk diterapkan karena kondisi yang sulit menerapkannya secara utuh sehingga tidak terlalu berpatokan secara menyeluruh mengenai pedoman dalam penyusunan RKP Desa dan lebih berpatokan pada pengalaman penyusunan RKP Desa tahun-tahun sebelumnya”

Padahal idealnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus disusun sesuai dengan informasi dari

pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Adanya Keterlambatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bagian ketiga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa paragraf 1 pasal 29 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan pemerintah desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Namun dari hasil wawancara yang dilakukan langsung pada tanggal 16 Oktober 2017 mengenai kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 Desa Sungai Rengit terhadap Sekretaris Desa Sungai, beliau mengatakan bahwa Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 dilaksanakan sekitar bulan September-Oktober 2017. Hal ini juga dapat dilihat dari dokumen lembar pengesahan yang terlampir dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit Tahun 2017 terlihat bahwa Rencana kerja ditetapkan pada bulan januari tahun 2017.

3. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Rengit Tahun 2017 Tidak Mengikut Sertakan Komponen Masyarakat

Selain itu juga telah dijelaskan bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam penyusunan RKP-Des harus mengikutsertakan unsur-unsur desa, namun dalam implementasinya keikutsertaaan masyarakat tidak secara komprehensif dari setiap golongan, hal ini dilihat dari daftar hadir penyusunan RKP-Des Tahun 2017.

Tabel 1.2 Daftar Komponen Masyarakat Desa Sungai Rengit

NO	PEJABAT ADMINISTRASI	JUMLAH
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris	1
3	Bendahara Desa	1
4	Kepala seksi	3
5	Kepala dusun	4
6	Ketua RT	40
7	BPD	11
8	LPM	12
9	PKK	4
10	LINMAS	10
11	Petani	723
12	Buruh Tani	46
13	Pedagang	40
14	Wirausaha	8
15	Karyawan Swasta	1.216
16	PNS/TNI dan POLRI	44

Sumber: dikelola penulis berdasarkan Profil Desa Sungai Rengit

Sesuai dengan data komponen masyarakat Desa Sungai Rengit terdiri atas 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris, Bendahara, Kepala seksi Pemerintahan, Kepala seksi Pembangunan, Kepala seksi masyarakat, 4 Kepala Dusun, 40 Ketua RT, BPD, LPM, PKK,LINMAS, tokoh agama, tokoh pendidikan. Berdasarkan daftar hadir peserta musyawarah penyusunan RKP Desa (lihat pada lampiran hal. 42) dapat di lihat bahwa peserta menghadiri musyawarah sebanyak 33 peserta yang terdiri dari 20 RT, 2 Kepala Dusun, 4 BPD, 1 LPM, 1 Kepala seksi Pembangunan, 1 Kepala seksi kemasyarakatan, 1 Kepala seksi Pemerintahan, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Sebagaimana yang dipaparkan dalam permendagri nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan idealnya harus mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat yang telah paparkan pada penjelasan sebelumnya. Berdasarkan daftar hadir yang terdapat di lampiran dapat diketahui masih adanya unsur-unsur masyarakat yang tidak diikutsertakan dalam musyawarah rencana kerja pemerintah desa.

Berdasarkan penjabaran data diatas dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses formulasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP-Des) Desa Sungai Rengit. Sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "**Proses Formulasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Sungai Rengit Tahun 2017".**

Peneliti berharap, tulisan ini dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki kegiatan politik maupaun administrasi di pemerintahan desa terkait dan juga bagi desa yang lain, selain itu juga peneliti berharap agar pemerintah pusat dapat lebih peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa sehingga dapat saling memperbaiki satu sama lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu Bagaimana Proses Formulasi Kebijakan RKP-Desa Sungai Rengit Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sungai Rengit?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui proses formulasi Kebijakan RKP-Desa Sungai Rengit 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sungai Rengit

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kajian yang diteliti khususnya ilmu tentang kebijakan publik baik itu dalam bentuk kebijakan, program, proyek, ataupun proses pembuatan kebijakan itu sendiri
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuat kebijakan dan instansi yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dunn. William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadja Mada University Press.

Islamy, Irfan. 1998. *Kebijakan Public*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.*Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Public Di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Atau Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.2014. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Omor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2014. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa. 2016. Jakarta

Peraturan Desa Sungai Rengit Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2017.2017.Sungai Rengit.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021 Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. 2016. Sungai Rengit.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.2017.Sungai Rengit.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. 2016. Sungai Rengit.

Skripsi

Adib, Akbar. 2016. *Forulasi Kebijakan Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar Di Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Purba, Harry Alfredo. 2016. *Formulasi Kebijakan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Tingkat Kecamatan Indralaya Utara Tahun 2016*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Indralaya:Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Stefani, Widya Christina. 2016. *Formulasi Kebijakan (Studi Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Internet

Depkeu. 2017. *Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2017*,(online),(www.djpk.depkeu.go diakses 19 November 2017).

Muhyidin, Toto Pribadi Ali. 2014. *Modul Pembelajaran "Sistem Politik Indonesia"*,(online),(http://repository.ut.ac.id/4306/1/ISIP4213-M1.pdf, diakses 06 Maret 2018).